

**Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa**  
(Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)

**Mohamad Amanu**  
**105120101111019**

**ABSTRAK**

Penelitian mengenai politik uang pada pemilihan kepala desa di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Peneliti memiliki beberapa tujuan yaitu *pertama* peneliti ingin melihat dan menggambarkan bentuk-bentuk praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa. *Kedua* peneliti ingin melihat kesadaran agen dan menghubungkannya dengan rasionalitas agen di dalam kontestasi pemilihan kepala desa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam melakukan pemilihan informan peneliti menggunakan teknik *purposive* dan *snowball* dengan menentukan informan berdasarkan kebutuhan data. Sedangkan data penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori strukturasi dari Anthony Giddens digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis praktik politik uang dan kesadaran agen dalam kontestasi pemilihan kepala desa.

Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bukti bahwa praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa dilakukan oleh *expert* agen (kandidat calon kepala desa, tim sukses) dan *lay* agen yaitu pemilih selain tim sukses. Adapun cara yang dilakukan oleh agen dalam praktik politik uang yaitu melalui kegiatan kampanye. Sedangkan wujud dari politik uang sebagai sarana antara interaksi pada *expert* agen dan *lay* agen berupa uang tunai, barang dan pemberian janji-janji politik seperti pembangunan infrastruktur dan ziarah wali lima.

Dalam melakukan tindakan praktik politik uang maupun partisipasi dalam kontestasi pemilihan kepala desa, setiap agen memiliki motivasi yang berbeda-beda. Diantaranya yaitu motivasi atas penghargaan, motivasi atas aktualisasi diri dan motivasi atas kebutuhan sosial. Secara teoritis motivasi atas penghargaan dan aktualisasi diri termasuk dalam bentuk kesadaran diskursif, sedangkan motivasi atas kebutuhan sosial merupakan bentuk kesadaran praktis agen. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan agen dalam kontestasi pemilihan kepala desa mencerminkan motif yang mengarah pada kepentingan-kepentingan individu ataupun kepentingan kelompok sebagai rasionalitas atas tindakan yang dilakukan.

**Kata Kunci : Expert agen, Lay agen, Tindakan, Sarana antara, Kesadaran Diskursif, Kesadaran Praktis.**

## ABSTRACT

The research attempts to investigate the practices of money politics in Jatirejo village Banyakan, Kediri during the head of village election. It aims to 1) describe the form of money politic practices during the election 2) it analyze the agent's consciousness and connect it to agent's rationality during the contestation

The method of this research is qualitative method with case study. Sampling is done by purposive technique and snowball and subsequently the informants are determined based on data requirements. The data are obtained through interview, tracing documentation, and observation. Then the theory Structuration by Anthony Giddens as analytical tool.

The results showed practices of money politics are committed by expert agent who is the candidate's of head of village and their team. The practice is evident in campaign activities and the flow of cash-money, staffs, and pledges of building of infrastructure, or some religious ritual such as pilgrimage into 5 muslim javanese saint, that establish the interactions between expert agent and lay agent.

In response to money politics and participation in contestation during the election, the agents are motivated by a variety of pretexts. Some of these are motivations of being appreciated expressing one self, and sustaining their livelihoods. This motivation has been always related to the agents's consciousness. The needs for appreciation and expression are categorized in the "discursive consciousness" and the need to sustain livelihood is "practical consciousness". Hence, agents's practices in the election mirror both individual and communal motives as their rationality.

**Keywords : Expert agent, Lay agent, Action, Means between, Consciousness discursive, Consciousness practice.**

### **A. Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.**

Secara umum politik uang adalah suatu bentuk pemberian berupa uang, barang atau janji menyuap seseorang supaya orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih salah seorang kandidat pada saat pemilihan umum. Politik uang sebenarnya bertentangan dengan UU No 3 Tahun 1999 Pasal 73 ayat 3 yang menjelaskan bahwa siapapun pada waktu diselenggarakan pemilihan umum melakukan pemberian atau janji menyuap, akan dipidana dengan hukuman

penjara paling lama 3 tahun. Pidana dikenakan kepada yang memberi maupun yang diberi (Darmawan, 2013, hlm.11).

Fenomena politik uang tidak hanya terjadi pada pemilihan umum ditingkat pusat maupun tingkat daerah saja tetapi juga terjadi pada tingkat pemilihan kepala desa. Menengok pada aspek kesejarahan pemilihan kepala desa di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak masa penjajahan. Bahkan sejak masa VOC (*Vereenigde Ostindische Compagnie*) di Jawa pada waktu itu sudah diadakan pemilihan kepala desa secara langsung oleh rakyat, walaupun yang dimaksud pemilihan pada waktu itu hanyalah kalangan terbatas saja seperti kalangan *elite* desamaupun keturunan dari kepala desa yang sebelumnya (Maschab, 2013, hlm. 28). Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat dengan hanya diwakili oleh seorang kepala keluarga dari sebuah keluarga saja (Maschab, 2013, hlm. 75).

Pada pemilihan kepala desa inilah penduduk pemilih melalui kepala keluarga sering menerima uang untuk memberikan suaranya dan adakalanya hal tersebut terkadang disebut juga sebagai zakat. Pada masa pasca reformasi ini politik uang juga masih terjadi pada pemilihan kepala desa. Seperti halnya yang terjadi pada pemilihan kepala desa di daerah Kabupaten Kediri pada 30 Oktober 2013 yang lalu. Pada saat itu pemilihan kepala desa secara serempak di 203 desa dari 344 desa yang ada di Kabupaten Kediri yang tersebar di 24 kecamatan dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri juga terdapat banyak keunikan dari masing-masing desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa, seperti adanya praktik politik uang, perjudian maupun adanya politik dinasti di tingkat desa (*Surya Online edisi 30/10/2013*).

Salah satu pemilihan kepala desa di Kabupaten Kediri yang terjadi praktik politik uang adalah di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Secara umum pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa ini hampir sama dengan desa-desa lainnya. Namun yang menarik dalam pemilihan kepala desa di Desa Jatirejo terletak pada iklim politiknya, dimana dalam pemilihan kepala desa ini terjadi persaingan yang sangat ketat diantara kedua calon kepala desa. Hal ini terjadi karena calon kepala desa yang maju pada pemilihan kepala desa 2013 merupakan kandidat yang sama pada pemilihan kepala desa tahun 2007 yang lalu. Sehingga situasi yang terjadi menjadi sorotan di daerah Kabupaten Kediri pada saat itu.

Persaingan yang ketat diantara kedua kandidat calon kepala desa ini memunculkan sensitifitas antar pendukung yang sangat tinggi dan berpotensi besar menimbulkan konflik. Selain itu persaingan politik uang diantara kedua kubu kandidat juga tidak bisa dihindarkan (wawancara dengan RT pada

30/01/2014). Pada intinya politik uang dilakukan agar kandidat calon kepala desa mendapat dukungan suara penuh dari pemilih dan dapat memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa.

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa tokoh di Desa Jatirejo. Peneliti mendapatkan keterangan bahwa salah satu calon kepala desa telah menyiapkan uang politik sebagai modal mencalonkan diri sebagai kepala desa dengan nominal sekitar 750 juta rupiah untuk bertarung dan mencari dukungan dari masyarakat dalam pemilihan kepala desa tersebut. Walaupun pada pelaksanaannya uang yang telah dihabiskan oleh masing-masing kandidat calon kepala desa hanya kisaran antara 250 sampai 350 juta rupiah. Ini karena praktik politik uang tidak berjalan maksimal karena masing-masing tim sukses dari kedua kandidat saling awas mengawasi lawan agar politik uang tidak berjalan maksimal. Sehingga pertarungan mencari dukungan diantara kedua kubu kandidat bisa seimbang, mengingat kekuatan ekonomi diantara kedua kandidat tidak seimbang (IF, wawancara pada 01/11/2014).

Dengan persiapan finansial yang sebegitu besar untuk ukuran sebuah jabatan kepala desa jelas tidak sebanding dengan apa yang akan didapatkan oleh kepala desa terpilih nantinya saat menjabat sebagai kepala desa. Padahal jika dilihat dari jabatan sebagai kepala desa di Kabupaten Kediri, seorang kepala desa dengan masa jabatan 6 tahun hanya mendapatkan tunjangan dari pemerintah daerah sebesar 950 ribu rupiah per bulan dan tanah ganjaran atau tanah bengkok yang luasnya 7 hektar. Jika dinominalkan tanah ganjaran atau tanah bengkok ini hanya sekitar 60 juta rupiah harga sewa pertahunnya (Wawancara dengan LPMD pada 31/1/2014).

Jika dihitung dalam angka, jumlah modal finansial yang dikeluarkan dengan apa yang didapatkan seorang kepala desa selama 6 tahun masa jabatan jelas tidak sebanding. Bahkan bisa dikatakan tidak akan kembali modal pada akhir jabatan selama 6 tahun. Hal ini jelas merupakan sesuatu yang tidak rasional. Namun yang menjadi menarik dari ketidakrasionalan atas pengeluaran modal yang dikeluarkan dengan apa yang didapatkan dari jabatan kepala desa, justru jabatan kepala desa banyak diminati dan diperebutkan oleh beberapa kalangan masyarakat di Desa Jatirejo yang mempunyai modal finansial yang mendukung.

Dari ketidakrasionalan diatas, peneliti mencoba mengacu pada tiga prinsip struktural dari Giddens yaitu *Pertama*, *signifikasi* yang berkaitan dengan dimensi simbolik, penyebutan dan wacana, dimana wacana yang dilakukan para calon kepala desa juga praktik politik uang sehingga akan mampu mempengaruhi pilihan masyarakat. *Kedua*, *dominasi* yang mencakup dimensi penguasaan atas orang (politik) dan barang (ekonomi) dimana rasionalitas calon kepala desa

dengan mengeluarkan modalnya dapat menjadi alasan untuk penguasaan atas orang dan ekonomi, dibalik praktik politik uang yang dilakukan. *Ketiga* yaitu *legitimasi* menyangkut dimensi peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum dimana dalam kasus politik uang ini terjadi karena adanya peraturan hukum dalam sebuah demokrasi masih belum menjadi suatu norma yang mengikat dan memberikan kesadaran penuh bagi *agen* (Priyono, 2002, hlm. 24).

Pernyataan diatas juga merupakan suatu bentuk praktik sosial yang menghubungkan dualitas *agen* dan *agensi* dimana pada praktik ini terjadi dualitas tindakan yaitu praktik politik uang sebagai tindakan individu di dalam memperoleh kedudukan dalam struktur sosial dan adanya motivasi serta motif kesadaran *agen* dalam melakukan tindakan politik uang tersebut (Giddens, 1984 dalam Ritzer dan Douglas, 2004, hlm. 569). Dalam kesadaran yang terbentuk dalam diri *agen*, Giddens melihatnya dari dua sisi yaitu *Expert Agen* (pelaku utama) dan *Lay Agen* (pelaku awam) (Giddens dalam Juliawan, 2010, hlm. 47). Dimana dalam melakukan tindakan praktik politik uang dan berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan kepala desa tentunya mereka mempunyai motivasi dan kesadaran yang tidak sama.

Dari kasus tersebut peneliti tertarik melihat itu sebagai suatu kesatuan yang utuh tidak hanya ingin melihat praktik politik uang yang terjadi dalam pemilihan kepala desa saja, tetapi juga melihat kesadaran *Expert agen* maupun *Lay agen* di dalam melakukan tindakan politik uang serta motivasi mereka yang menggambarkan motif kesadaran dibalik tindakannya. Sehingga akan terlihat jelas secara holistik fenomena politik uang dalam pemilihan kepala desa baik dari segi subyek maupun obyeknya. Kemudian yang menjadi dasar penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik politik uang dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana kesadaran *Agen* dalam kontestasi pemilihan kepala desa di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

### **Konsep Korupsi Politik dan Korupsi Pemilu**

Secara harfiah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruption* yang berarti perilaku yang tidak bermoral. Secara umum korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku pribadi (Al-Attas, 1981, hlm. 11).

Menurut Al-Attas korupsi sendiri memiliki tahap-tahap dalam penyebarannya. *Pertama*, korupsi terbatas yaitu korupsi yang dilakukan oleh kalangan elit saja.

*Kedua*, korupsi yang sudah merata dilapisan masyarakat dan yang *ketiga*, korupsi yang sudah membudaya di setiap elemen masyarakat yang sudah sangat sulit untuk diatasi. (Al-Attas, 1981, hlm. 31-34).

Secara garis besar fenomena korupsi dibagi menjadi tiga tipe, pertama, penyuapan (*bribery*), kedua, *pemerasan (extortion)* dan *nepotisme*. Sebuah tindakan dikatakan sebagai korupsi jika mempunyai ciri-ciri *pertama* dalam praktiknya pasti melibatkan lebih dari satu orang. *Kedua* tindakan yang dilakukan masih bersifat sangat rahasia. *Ketiga* dalam ada unsur timbal balik antara orang satu dengan orang lainnya. *Keempat* para pelaku mempunyai kekuatan yang besar sehingga mampu berlindung dalam pelanggaran hukum yang dilakukannya dan yang kelima merupakan bentuk penghianatan dimana kepentingan individu pelaku lebih kuat daripada kepentingan publik (Al-Attas, 1986, hlm. 13-14). Dalam sudut pandang politik dan demokrasi, korupsi dapat dibedakan menjadi dua yaitu korupsi politik dan korupsi pemilihan umum.

Korupsi politik merupakan praktik haram berupa penyelewengan yang dilakukan pejabat atau politisi untuk kepentingan pribadi dengan tujuan melanggengkan kekuasaan maupun peningkatan kesejahteraan yang terjadi secara luas baik sebelum, ketika menjabat dan sesudah menjabat sebagai pejabat publik dalam bentuk perdagangan yang berada dalam pengaruh kekuasaan (Hobbes dalam ICW, 2010, hlm.10). Korupsi politik dapat dilihat dari tiga sisi pendekatan atau sudut pandang. Pertama lembaga publik (*public office*), kedua kepentingan publik (*public interest centered*) dan sudut pandang pasar (*market centered*). Selain itu dari pandangan hukum korupsi dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari segi norma hukum (*legal norms*) dan pendekatan opini publik (*Public opinion*) (Phillip dalam ICW, 2010, hlm. 13). Dari berbagai pendekatan di atas korupsi politik setidaknya mempunyai tujuh unsur yang diantaranya :

1. Tingkah laku yang menyimpang dari kebiasaan atau aturan norma yang berlaku
2. Dilakukan untuk memuluskan kepentingan pribadi, keluarga dekat maupun kelompok-kelompok tertentu
3. Menyebabkan terjadinya kerugian maupun kerusakan kepentingan publik
4. Dilakukan oleh orang yang memiliki posisi atas pelaksanaan tanggung jawab publik tertentu baik dalam birokrasi maupun lembaga publik yang lain
5. Posisi yang dimiliki didapatkan melalui mekanisme politik
6. Menyangkut tindakan yang dapat mempengaruhi kebijakan kelompok kepentingan tertentu baik diluar birokrasi maupun lembaga publik yang lain
7. Menjadikan lembaganya sebagai lembaga bisnis yang dapat memaksimalkan keuntungan dan anggaran publik.

Sedangkan korupsi pemilihan umum sebenarnya merupakan bagian dari korupsi politik. Namun dalam pengertiannya korupsi pemilihan umum merupakan korupsi yang dilakukan politisi sebelum mendapatkan sebuah jabatan atau kekuasaan dengan melakukan praktek haram pada saat pemilihan umum dengan cara mempengaruhi pemilih melalui suap menyuap atau politik uang (Pfeiffer dalam ICW, 2010, hlm. 22). Korupsi pemilihan umum terjadi dalam relasi antara partai politik, kandidat, penyelenggara pemilihan umum dan juga para pemilih. Namun biasanya relasi yang terjadi antara kandidat dengan pemilih sangat menonjol ditemui dalam pemilihan umum yaitu dengan cara melakukan politik uang.

Politik uang dalam pemilihan umum seolah menjadi hal yang biasa, padahal perlu diketahui bahwa politik uang sangat berbahaya dan mengancam integritas pemilihan umum dimana seorang pemilih tidak memilih kandidat sesuai dengan kesadaran politiknya tetapi menggunakan kesadaran semu yang bersumber dari sikap *apatisme* dan karena adanya tekanan ekonomi. Seperti yang terjadi di Amerika Latin, bahwa basis massa yang dipengaruhi praktik politik uang cenderung pada golongan masyarakat yang berpendapatan rendah (Pfeiffer dalam ICW, 2010, hlm. 22). Pada intinya pola korupsi yang terjadi dalam pemilihan umum dapat digolongkan menjadi empat modus diantaranya:

1. Beli suara (*Vote Buying*) dimana partai atau kandidat membeli suara pemilih dengan menggunakan politik uang, barang, atau jasa, jabatan dan bentuk finansial lainnya.
2. Beli kursi (*Candidacy Buying*) dimana kelompok orang atau kelompok kepentingan mencoba membeli nominasi agar dicalonkan dalam pemilihan umum
3. Memanipulasi tahapan-tahapan proses pemilihan umum
4. Dana kampanye bersifat mengikat (*Abusive Donation*) menjadikan sumbangan sebagai investasi politik.

### **Konsep Politik Uang dan Pemilihan Umum**

Secara umum politik uang diartikan sebagai seni untuk memperoleh kemenangan dalam memperebutkan kekuasaan. Sedangkan uang politik hanya sebagai akses untuk memperoleh kemenangan tersebut (Sumartini dalam Hastuti dkk, 2012, hlm. 4). Sedangkan menurut Ismawan politik uang diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu atau bisa dikatakan sebagai jual beli suara pada proses politik demokratisasi atau pemilihan umum seperti pemilihan tingkat nasional maupun pemilihan tingkat desa (Ismawan, 1999, hlm. 5).

Dalam perjalannya bahwa politik uang ini merupakan tindakan membagi-bagikan uang, barang dan jasa sudah mengalami pembiasaan makna. Sedangkan batasan pelaku politik uang menurut Ismawan adalah orang yang memberi uang politik baik kandidat, pendukung atau tim sukses dan penerima uang politik dalam bentuk apapun. Politik uang dilakukan dengan sadar oleh pihak-pihak yang melakukan praktik politik uang (Ismawan, 1999, hlm. 5).

Dalam pengertian diatas dapat dipahami bahwa politik uang adalah pemberian berupa apapun untuk mempengaruhi keputusan pilihan seseorang atas pemimpin di dalam kontestasi pemilihan umum dalam rangka memperoleh kekuasaan. Dalam Komunikasi politik aktor politik uang dalam pemilihan umum juga dibagi menjadi tiga yaitu kandidat atau konstituen, pendukung atau tim sukses dan pemilih (Wibowo, 2013, hlm. 186). Sedangkan tim sukses sendiri dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Tim sukses formal : Tim sukses yang professional dan bekerja secara terstruktur dalam mendukung kandidat yang diusungnya. Tim sukses ini biasanya memiliki sumber daya baik massa dan sumber daya finansial.
2. Tim sukses nonformal : Tim sukses yang bekerja dilapangan dan biasanya cenderung tidak mempunyai sumber daya keuangan tetapi lebih pada sumbangan tenaga. Tim sukses ini biasanya diambil dari unsur keluarga kandidat atau masyarakat yang memiliki kedekatan dengan kandidat.

Kemudian politik uang sendiri dilakukan oleh pelaku dengan berbagai cara demi tersampainya tujuan politik kandidat dalam memperoleh dukungan dari calon pemilih. Seperti yang disebutkan Hastuti dkk (2012) bahwa cara penyebaran politik uang umumnya dilakukan dengan menggunakan dua bentuk yaitu :

1. Kampanye : Merupakan suatu proses yang dirancang dan direncanakan secara sadar, bertahap dan berkelanjutan dan dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak yang telah ditetapkan. Dalam kampanye ini biasanya dimanfaatkan untuk pemberian uang maupun barang berupa sembako maupun atribut atribut lainnya.
2. Serangan fajar : Merupakan cara yang dilakukan menjelang pencoblosan dengan usaha mendatangi rumah-rumah calon pemilih agar memilih kandidat tertentu dalam pemilihan umum.

Selain itu, politik uang yang diberikan oleh pelaku (pemberi) kepada pemilih terbagi menjadi beberapa bentuk atau wujud. Dalam hal ini menurut Hastuti bentuk atau wujud politik uang dibagi menjadi tiga antara lain:

1. Uang : uang tunai dibagikan secara langsung kepada pemilih. Lazimnya pemberian uang secara langsung ini sangat bervariasi disetiap pemilihan umum berlangsung.

2. Barang : bentuk politik uang yang kedua adalah berupa barang, barang yang dimaksud ini bisa berupa sembako, kaos, atribut maupun *sovenir* dan yang lainnya.

Kolektif kelompok : politik uang ini dilakukan dengan cara pengumpulan kelompok dengan pemberian sumbangan berupa bantuan pembangunan sarana dan prasarana maupun pemberian janji-janji politik ketika kandidat nantinya terpilih dalam kontestasi pemilihan (Hastuti dkk, 2012, hlm. 7).

### **Praktik Sosial dan Kesadaran dalam Teori Stukturasi Giddens**

Sebelum membahas praktik sosial, hendaknya perlu memahami dulu apa yang disebut sebagai tindakan. Tindakan adalah aliran tiada henti dari pengalaman yang diresapi, kategori pada sektor pengalaman khas tertentu yang bergantung pada sebuah proses perhatianreflektif dari aktor yang berhubungan dengan yang lain (Giddens, 2010, hlm. 94). Sedangkan menurut Giddens bahwa praktik sosial ialah tindakan yang berulang dan terpola pada lintas ruang dan waktu (Priyono, 2003, hlm. 22).

Praktik sosial di dalamnya juga terdapat aktivitas sehari-hari yang dilakukan secara terus menerus dan menjadi sebuah rutinitas yang dapat dicipta ulang menjadi praktik sosial yang baru maupun berhenti pada praktik sosial yang lama karena adanya de-rutinisasi. Dalam melakukan rutinitas di dalamnya ada interkasi antar agendan adanya kesadaran *agen* di dalam melakukan sebuah tindakan. Karena pada dasarnya tindakan terbentuk jika ada maksud dari *agen* atas tindakannya. Sedangkan tindakan dan praktik sosial mengandaikan sebuah komunikasi yang mempunyai penandaan tertentu dimana di dalam setiap praktik sosial adanya rutinitas terjadi di dalam ruang dan waktu melalui interaksi dan komunikasi agen-agen dengan sarana finansial (ekonomi) ataupun penguasaan atas orang (Priyono, 2003, hlm. 26).

Kemudian pada konteks kesadaran, bahwa kesadaran dalam diri manusia terbentuk karena adanya sebuah praktik sosial dan struktur di dalam ruang dan waktu. Kesadaran dalam teori sosial sangat penting untuk dipelajari dan dipahami karena pengaruh kesadaran yang dimiliki individu ada berbagai macam bentuk atau sifatnya. Pada teori stukturasinya, Giddens menyatakan bahwa di dalam tingkat kesadaran ada dua bentuk kesadaran yaitu kesadaran *diskursif* dan kesadaran *praktis* (Giddens, 2010, hlm. 64).

Kesadaran *diskursif* yaitu kesadaran yang dapat dijelaskan secara *verbal*. Para *agen* yang mampu mengatakan sesuatu atau memberikan sebuah ekspresi secara *verbal*, khususnya dengan kondisi-kondisi dari suatu tindakannya sendiri. Sedangkan kesadaran *praktis* yaitu kesadaran yang tidak mampu diekspresikan

secara *verbal* atas tindakan yang dilakukan oleh *agen* itu sendiri, tetapi lebih terlihat pada tindakannya. Dengan kata lain bisa mengingat namun tidak mampu untuk mengekspresikan wacana.

Selain kesadaran *diskursif* dan *praktis*, didalam diri (*internal*) *agen* setidaknya memuat 3 *elemen* kesadaran yaitu monitoring refleksif, rasionalisasi tindakan dan motivasi (Giddens, 2010, hlm. 8). Yang dimaksud dengan monitoring refleksif disini adalah ciri tindakan sehari-hari yang terus dilakukan dan melibatkan perilaku yang tidak hanya pada individu itu sendiri tetapi juga orang lain. Pada kesadaran internal individu yang kedua yaitu rasionalisasi tindakan yaitu lebih mengarah pada penjelasan *agen* atas sebagian besar tindakannya dan cara yang mereka lakukan.

Dalam rasioanalisis ini *agen* lebih memiliki pilihan atas tindakan yang mengarah pada rasionalitasnya dalam melakukan tindakan. Sedangkan motivasi akan lebih mengarah pada keinginan *agen* melakukan suatu tindakan yang dapat diketahui ataupun dilihat dari perilaku *agen* itu sendiri. Motivasi dapat mengarah pada perilaku yang dapat memberikan keuntungan pada *agen* misalnya seperti keuntungan ekonomi maupun keuntungan yang lainnya atas tindakan yang dilakukannya. Dari sinilah kesadaran *diskursif* dan kesadaran *praktis* akan terwujud jika *agen* mampu merefleksikan ketiga kesadaran yang ada pada dirinya (Giddens, 2010, hlm. 8).

### **Metode Penelitian yang Digunakan**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali data lebih mendalam. Metode kualitatif digunakan untuk memahami tentang fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistic dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2008, hlm. 6). Dengan menggunakan penelitian kualitatif ini diharapkan informasi dan data yang akan diperoleh dari penelitian akan lebih mendalam dan dapat mengulas penemuan-penemuan yang sifatnya masih remang-remang dan mengambang tingkat kebenarannya.

Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data dari hasil *interview*, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dokumen resmi, ataupun data-data yang dapat dijadikan petunjuk lainnya untuk digunakan dalam mencari data dengan interpretasi yang tepat (Sugiono, 2010, hlm. 17). Sedangkan pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus berguna ketika seseorang perlu memahami suatu problem, situasi tertentu dengan sangat mendalam. Dengan pendekatan ini peneliti dapat mengidentifikasi orang yang kaya informasi karena suatu persoalan besar

dapat dipelajari dari beberapa fenomena dalam bentuk pertanyaan (Petton, 1991, hlm. 24). Dalam studi kasus sebuah kasus bisa berupa orang, peristiwa, program, periode waktu, insiden kritis dan komunitas.

Menurut Yin (2002) Studi kasus juga berupaya menggambarkan unit penelitian dengan mendalam, detail dan secara holistik. Studi kasus sangat cocok digunakan dalam suatu penelitian yang mengandung pertanyaan *how* (bagaimana) atau *why* (mengapa). Selain itu Yin (2002) juga menjelaskan studi kasus sangat cocok digunakan dalam penelitian bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidikinya dan jika kasus yang diteliti termasuk dalam kasus yang *kontemporer* dan terjadi dalam kehidupan nyata (Yin, 2002, hlm. 1).

Fokus penelitian ini hanya pada pelaku praktik politik uang, mekanisme penyebarannya, bentuk-bentuk dari praktik politik uang dan melihat kesadaran dari masing-masing *agen* atau pelaku di dalam melakukan tindakan tersebut di dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Sehingga peneliti mampu menjelaskan rasionalitas dari masing-masing *agen* atas tindakan yang dilakukan. Sedangkan teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*. Teknik *purposive* yaitu pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, dengan memilih informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sedangkan teknik *snowball* merupakan teknik bola salju, yaitu penentuan informan atas pertimbangan dari informan sebelumnya yang mengarahkan pada informan selanjutnya (Sugiono, 2010, hlm. 54).

Pada tahapan pengumpulan data, di dalam pendekatan studi kasus sebenarnya mencakup enam sumber yang dapat digunakan sebagai penunjang penelitian diantaranya yaitu dokumentasi, wawancara, rekaman arsip, pengamatan langsung, pengamatan partisipan dan perangkat-perangkat fisik (Yin : 2002, hlm. 101). Namun penelitian ini tidak menggunakan teknik tersebut secara keseluruhan, tetapi hanya mengambil beberapa teknik yang dianggap relevan dengan keadaan dilapangan. Sehingga peneliti hanya mengambil 3 teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi saja. Adapun langkah yang dilakukan peneliti yaitu observasi secara langsung dilapangan, kemudian melakukan wawancara semi terstruktur dengan informan dan mengumpulkan bukti-bukti dokumen seperti rekaman, gambar dan arsip-arsip lainnya.

Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari pengujian, pentabulasian, pengkombinasian bukti-bukti untuk menunjuk proposisi awal suatu penelitian. Pendekatan studi kasus mempunyai tiga teknik penting dalam menentukan analisis data yaitu teknik penjodohan pola, teknik pembuatan penjelasan atau explanasi dan teknik analisis deret waktu (Yin, 2002, hlm. 133).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik penjadohan pola dengan membandingkan pola yang didasarkan pada konsep empiris yang dibangun peneliti dengan data yang diperoleh dari hasil di lapangan.

Pengujian validitas dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan dilapangan, melakukan pengamatan dengan lebih cermat, model triangulasi (bentuk waktu, teknik, ataupun sumber), analisis kasus negative maupun mengadakan *member check* (Sugiono, 2010, hlm 122-129). Penelitian ini uji validitas data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah upaya memeriksa validitas data dengan memanfaatkan hal lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan (Sugiono, 2010, hlm. 125).

Triangulasi ini dilakukan atas dasar sumber data, teknik pengambilan data, waktu dan teori. Triangulasi data dilakukan dengan cara melakukan pengujian dan pencocokan antara data sekunder yang berasal dari berbagai sumber seperti arsip desa, internet, jurnal ilmiah dan lain sebagainya dengan data primer yang didapatkan ketika penelitian langsung di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian peneliti akan melakukan pencocokan antara data hasil observasi lapang yang dilakukan oleh peneliti dengan hasil wawancara dengan para informan. Kemudian pada tahap yang terakhir akan menariknya dalam sebuah kesimpulan penelitian.

#### **B. Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Tahun 2013.**

Praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri sudah terjadi sejak pemilihan kepala desa tahun 1968 yang lalu. Praktik politik uang ini telah menjadi budaya pada setiap pemilihan kepala desa di Desa Jatirejo hingga saat ini. Salah satunya pada pemilihan kepala desa tahun 2013 yang lalu. Pada penelitian ini ditemukan beberapa permasalahan terkait praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa diantaranya dari segi pelaku, tindakan yang dilakukan dalam praktik politik uang dan wujud politik uang yang diberikan kepada pemilih.

Dari penelitian ini di dapatkan hasil bahwa pelaku praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Jatirejo tahun 2013 yang lalu terdiri dari tiga pelaku atau agenyaitu *pertama* kandidat calon kepala desa, *kedua* tim sukses yang terbagi menjadi dua yaitu tim sukses formal dan tim sukses non formal. Kemudian pelaku yang *ketiga* yaitu pemilih atau masyarakat biasa yang tidak berperan sebagai tim sukses dari kandidat calon kepala desa.

Pada pemilihan kepala desa Jatirejo tahun 2013 yang lalu, terdapat dua kandidat calon kepala desa yaitu NA dan IS. Kandidat ini merupakan kandidat yang sama dengan pemilihan kepala desa Jatirejo pada tahun 2007 yang lalu. Kemudian pada penelitian ini diperoleh data, bahwa yang dimaksud sebagai tim sukses formal adalah orang yang profesional dan memiliki modal finansial yang cukup untuk mendukung kandidat calon kepala desa. Dalam hal ini tim sukses formal terdiri dari *elite* ekonomi desa dan *elite* pemerintahan desa. Sedangkan tim sukses nonformal yaitu tim sukses yang hanya membantu pemenangan kandidat calon kepala desa dengan bantuan tenaga. Karena tim sukses ini tidak mempunyai modal finansial yang lebih dibandingkan dengan tim sukses formal, biasanya tim sukses ini berasal dari kolega maupun sanak keluarga dari kandidat calon kepala desa. Sedangkan pemilih merupakan pelaku sebagai obyek dalam praktik politik uang atau disebut sebagai penerima uang politik.

Kemudian praktik politik uang dijalankan oleh para pelaku melalui beberapa kegiatan seperti kampanye dan serangan fajar. Namun di dalam penelitian ini kegiatan serangan fajar tidak terjadi karena tim sukses dari masing-masing kandidat saling mengawasi agar tidak terjadi serangan fajar yang mampu merubah pilihan masyarakat. Tetapi praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa Jatirejo ini tetap dilakukan oleh agen melalui tindakan-tindakan di dalam kegiatan kampanye. Adapun tindakan agen dalam praktik politik uang pada pemilihan kepala desa Jatirejo dilakukan melalui pengumpulan tim sukses, kegiatan keagamaan seperti istighosah, pengajian maupun santunan anak yatim, *door to door* dan silaturahmi, menjadikan warung sebagai arena politik, dan tindakan praktik politik uang melalui kegiatan pawai atau arak-arakan keliling desa.

Pada setiap tindakan di dalam kegiatan kampanye di atas, praktik politik uang selalu terjadi karena pada intinya di dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku terdapat tindakan praktik politik uang. Sedangkan pada penelitian ini wujud dari politik uang sendiri terbagi menjadi dua bentuk yaitu politik uang dalam bentuk barang dan politik uang dalam bentuk kolektif kelompok. Adapun wujud politik uang ini selalu dibagikan di dalam setiap kegiatan kampanye dari masing-masing kubu kandidat calon kepala desa.

Bentuk politik uang yang *pertama* yaitu berupa barang juga terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya ada bentuk uang tunai, beras, sembako, dan kupon belanja. Semua bentuk politik uang ini dibagikan melalui perantara tim sukses dengan caranya masing-masing. Kemudian dari segi nominal ataupun jumlah barang yang dibagikan oleh masing-masing calon kepala desa juga tidak sama. Dari hasil penelitian ini diperoleh data, bahwa jumlah nominal uang tunai yang

dibagikan oleh kandidat nomor satu (NA) berjumlah 100-300 ribu sedangkan jumlah nominal dari kandidat nomor dua (IS) berjumlah 50-75 ribu rupiah. Sedangkan untuk beras dan sembako seberat 3 kg dan kupon belanja masing-masing mempunyai nominal 20 ribu rupiah. Adapun pemberian beras dan kupon belanja hanya dilakukan oleh kandidat calon kepala desa nomor satu (NA).

Kemudian wujud politik uang yang *kedua* yaitu berupa kolektif kelompok terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya yaitu berupa janji pembangunan infrastruktur, janji pembiayaan ziarah wali lima, janji pembangunan makam tokoh desa, dan janji pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Pada penelitian ini janji pembangunan infrastruktur yang diberikan oleh kedua kubu kandidat calon kepala desa yaitu berupa pembangunan jalan, sekolah, dan bangunan lainnya yang dapat menunjang kegiatan masyarakat desa. Kemudian janji ziarah wali lima dilakukan oleh kedua kandidat calon kepala desa agar mereka mendapatkan dukungan dari para tokoh agama di desa Jatirejo. Sedangkan janji pembangunan makam tokoh desa dan pembangunan sarana ibadah juga sudah diwujudkan melalui sumbangan yang diberikan oleh kedua kubu calon kepala desa yakni sumbangan untuk membangun makam, kemudian sumbangan untuk membangun gapura masjid dan sumbangan untuk pembangunan sumur di salah satu mushola di Desa Jatirejo.

Dari semua data yang telah dipaparkan diatas, peneliti ingin melihat beberapa temuan sebagai konsep teoritis. *Pertama*, peneliti melihat pelaku, dimana dalam penelitian ini secara teoritis peneliti mengkalsifikan pelaku sebagai *expert agen* dan *lay agen*. *Expert agen* disini merupakan pelaku yang mempunyai kesadaran lebih dalam bertindak sedangkan *lay agen* diartikan sebagai orang yang selalu berkorelasi dengan *lay agen* namun tidak mempunyai kalkulasi yang jelas atas tindakannya (Juliawan, 2010, hlm. 45). Dalam penelitian ini *expert agen* adalah pelaku politik uang sebagai pemberi uang yaitu kandidat calon kepala desa dan tim sukses. Sedangkan pada posisi *lay agen* ialah pemilih atau sebagai penerima politik uang.

*Kedua*, dijelaskan bahwa di dalam praktik politik uang pada pemilihan kepala desa di Desa jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri telah ditemukan bahwa tindakan *agen* di dalam praktik politik uang terbentuk mulai interaksi *agen* yang membentuk suatu rutinitas dan terjadi di dalam ruang dan waktu di dalam kegiatan kampanye pengumpulan tim sukses, kegiatan keagamaan, silaturahmi, warung sebagai arena politik dan pawai, semua ini adalah tindakan yang merupakan bagian dari praktik sosial. Seperti yang telah dikatakan Giddens bahwa praktik sosial merupakan tindakan yang berulang dan terjadi di dalam ruang dan waktu (Giddens dalam Priyono, 2003, hlm.22).

*Ketiga*, di dalam setiap tindakan politik uang ini, wujud politik uang seperti barang maupun kolektif kelompok digunakan sebagai sarana antara untuk memuluskan jalan kemenangan calon kepala desa agar memperoleh kemenangan dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Sarana antara inilah yang menurut (Giddens dalam Priyono, 2003, hlm. 22) sebagai penghubung antar kepentingan *agen* di dalam interaksi sosial dan komunikasi antar *agen*. Adanya agen, tindakan, sarana antara dan struktur yang telah dijelaskan diatas, dapat dipahami sebagai suatu kesatuan praktik sosial.

### **C. Kesadaran Agen dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.**

Pada penelitian ini kesadaran agen dapat dilihat melalui motivasi tindakan yang dimiliki oleh agen dalam berpartisipasi pada kontestasi pemilihan kepala desa. Peneliti menemukan fakta dilapangan setidaknya motivasi expert agenyang *pertama* yaitu kandidat calon kepala desa setidaknya memiliki tiga bentuk motivasi yaitu motivasi atas penghargaan atau status (*prestise*), motivasi aktualisasi diri dan motivasi atas kebutuhan sosial. Motivasi atas penghargaan merupakan alasan utama dari kandidat calon kepala desa maju dalam pemilihan kepala desa seperti kenaikan status sosial atau *prestise* di masyarakat.

Kemudian pada motivasi atas aktualisasi diri ini lebih mengarah pada suatu bentuk pengabdian, dimana seorang kandidat calon kepala desa maju dalam kontestasi pemilihan kepala desa karena adanya keinginan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Sedangkan motivasi atas kebutuhan sosial ini lebih mengarah pada alasan politik untuk mendominasi orang lain dengan wewenang dan kekuasaan yang akan dimilikinya. Kemudian ada motivasi atas kebutuhan sosial yang mengarah pada orientasi ekonomi seperti kenaikan pendapatan yang akan diperoleh ketika kandidat calon kepala desa terpilih dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Salah satu alasan orientasi ekonomi yang dimaksud yaitu pendapatan atas tanah bengkok atau tanah ganjaran, tunjangan dari pemerintah daerah dan adanya indikasi pendapatan tambahan dari hasil pengangkatan perangkat desa yang tidak transparan.

Secara jelas dalam penelitian ini ditemukan bukti bahwa seorang kepala desa yang terpilih di dalam kontestasi pemilihan kepala desa akan memperoleh tanah bengkok seluas 7 hektar selama masa jabatan enam tahun ditambah 20% dari tanah bengkok selama 4 tahun setelah masa tugas berakhir. Kemudian untuk tunjangan seorang kepala desa setiap bulan rata-rata mendapatkan uang dari pemerintah daerah sebesar 950 ribu rupiah. Sedangkan pada pengangkatan perangkat desa peneliti menemukan fakta bahwa untuk menjadi perangkat desa

harus mengeluarkan uang sebesar 80 juta lebih untuk diberikan pada kepala desa ataupun pejabat di atasnya. Kasus ini terjadi pada pemerintahan sebelumnya, tetapi bukan tidak mungkin ini akan tetap terjadi selama ada kekosongan jabatan perangkat di desa tersebut.

Kemudian motivasi expert agen yang *kedua* yaitu tim sukses. Pada penelitian ini motivasi tim sukses terbagi menjadi dua yaitu motivasi atas aktualisasi diri dan motivasi atas kebutuhan sosial. Pada konteks motivasi atas aktualisasi diri peneliti menemukan tiga hal penting di dalam diri tim sukses dalam berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan kepala desa diantaranya yaitu karena adanya keinginan memiliki pemimpin yang ideal, adanya unsur kekeluargaan dengan kandidat, adanya unsur balas budi dan adanya unsur kekecewaan pada pemerintahan sebelumnya.

Keinginan memiliki pemimpin yang ideal dari masing-masing tim sukses menjadi berbeda-beda tergantung dengan perspektif dari dalam diri mereka masing-masing. Namun pada intinya seorang pemimpin yang ideal itu bagi mereka adalah pemimpin yang sederhana dan mampu mengayomi masyarakatnya, sehingga menurut mereka calon kepala desa yang seperti itulah yang patut diperjuangkan. Kemudian motivasi atas dasar unsur kekeluargaan dan balas budi ini muncul karena tim sukses tersebut telah diangkat sebagai perangkat desa sehingga bagaimanapun harus melakukan balas budi dengan berjuang mendukung salah satu dari kandidat tersebut. Ini membuktikan bahwa dalam pengangkatan perangkat desa selain adanya unsur suap juga terdapat unsur *nepotisme* pada unsur kekeluargaan.

Sedangkan motivasi atas aktualisasi diri dari tim sukses, selain adanya keinginan untuk memilih pemimpin yang ideal dan unsur kekeluargaan juga ada alasan lain yaitu karena adanya unsur kekecewaan pada pemerintahan sebelumnya. Dari hasil penelitian di lapangan, peneliti mendapatkan data bahwa tim sukses pendukung IS pada pemilihan kepala desa 2013, adalah mayoritas pendukung dari kandidat *incumbent* yaitu NA pada pemilihan kepala desa tahun 2007 yang lalu. Ini karena adanya kekecewaan atas kebijakan maupun strategi politik dari calon *incumbent* yang tidak menguntungkan pendukungnya pada saat menjabat sebagai kepala desa. Misalnya dalam penyelenggaraan proyek-proyek pembangunan desa yang cenderung dikerjakan sendiri sebagai proyeknya. Sehingga pada tahun 2013 IS dimunculkan kembali untuk melawan kandidat *incumbent*.

Motivasi yang kedua dari tim sukses dalam kontestasi pemilihan kepala desa adalah motivasi atas kebutuhan sosial. Motivasi ini terdiri dari beberapa unsur yang mengarah pada orientasi kepentingan individu atau kelompok-

kelompok tertentu. Kepentingan di dalam motivasi atas kebutuhan sosial ini terbagi menjadi tiga yaitu kepentingan bisnis, kepentingan dominasi dan kepentingan ekonomi. Pada kepentingan bisnis, peneliti melihat bahwa kedua calon kepala Desa Jatirejo yang maju di didalam pemilihan kepala desa sama-sama didukung oleh *elite* ekonomi di desa maupun golongan elite pemerintahan desa. Keduanya mempunyai *basic* sebagai pengusaha, baik di bidang pertanian maupun dibidang kontraktor. Hal inilah kemudian yang menjadikan politik pada pemilihan kepala desa dijadikan sebagai ajang perjuangan kepentingan bisnis bagi mereka.

Kemudian adanya kepentingan dominasi, dimana Desa Jatirejo saat ini menjadi sangat strategis bagi para pemilik modal. Seperti halnya potensi tanah galian saat yang sekarang ini telah menjadi lahan bisnis bagi beberapa *elite* desa. Galian ini menjadi bisnis yang sangat menjanjikan karena hasil galian berupabatu dan galian tanah dapat dijual kepada perusahaan maupun kepada masyarakat untuk pembangunan rumah. Namun keberadaan galian ini bukan tanpa masalah yakni menyangkut sebab akibat yang akan timbul akibat galian ini bagi masyarakat.

Motivasi atas kebutuhan sosial yang ketiga dari tim sukses yaitu adanya kepentingan ekonomi. Pada realitas yang ada dilapangan, keterpilihan seorang kandidat calon kepala desa yang didukungnya akan memberikan kelonggaran pada dirinya untuk melakukan suatu hal yang dapat mengutungkan dirinya secara ekonomi. *Pertama* di dalam hal pembuatan surat-surat bagi masyarakat. Disini seorang perangkat desa akan mendapat uang *suap* sebagai imbalannya. *Kedua* dari penelitian ini, peneliti menemukan data bahwa perangkat desa mempunyai keterlibatan dalam bisnis penjualan tanah sebagai makelar.

Selain expert agen, motivasi atas partisipasi dalam kontes pemilihan kepala desa juga dimiliki oleh lay agen atau masyarakat sebagai pemilih dan penerima politik uang di Desa Jatirejo. Pada penelitian ini, peneliti membagi dua motivasi penting yang dimiliki oleh lay agen atau pemilih yaitu motivasi atas aktualisasi diri dan motivasi atas kebutuhan sosial. Motivasi atas aktualisasi diri ini lebih mengarah pada persepsi dan pandangannya mengenai politik uang maupun pilihan atas pemimpin yang ideal bagi lay agen. Dari penelitian ini, peneliti melihat sikap lay agen atas tindakan politik uang dimaknai sebagai suatu pelanggaran dan dapat merugikan dirinya suatu saat kelak. Mereka juga menyadari bahwa seorang pemimpin tidak bisa diukur dari jumlah uang yang dimiliki. Mereka hanya mengharapkan adanya seorang pemimpin yang jujur, mau mengayomi dan yang terpenting mudah ditemui untuk dimintai tanda tangan atas surat-surat yang dibutuhkan oleh mereka. Dari hasil penelitian ini, lay agen lebih memilih figure

seorang kandidat dibandingkan dengan jumlah nominal uang yang dibagikan oleh kedua kubu kandidat calon kepala desa.

Kemudian motivasi agen atas kebutuhan sosial lebih mengarah pada permasalahan dalam penyikapan atas praktik politik uang oleh *lay agen*. Dimana pada intinya mereka telah sadar akan pelanggaran politik uang tetapi disisi lain mereka membutuhkan itu. Bahkan masyarakat yang tergolong pra-sejahtera sangat mengharapkan adanya pemberian uang sebelum pemilihan kepala desa. Hasil penelitian dilapangan peneliti melihat, bahwa sebagian besar masyarakat desa Jatirejo enggan untuk datang ke TPS jika tidak ada uang transport sebagai pengganti upah mereka selama meluangkan waktu untuk memilih.

Dari penjelasan tentang motivasi *expert agen* dan *lay agen* dalam kontestasi pemilihan kepala desa diatas, peneliti mencoba melihatnya dari sudut pandang teoritis. Secara teoritis, motivasi *agen* dalam kontestasi pemilihan kepala desa diatas merupakan suatu bentuk kesadaran. Konsep kesadaran pada intinya merujuk pada mekanisme *psikologis* berupa tindakan mengingat. Dalam hal ini kesadaran mengingat akan dibahasakan sebagai kesadaran *diskursif* maupun *praktis*. Dimana kesadaran *diskursif* lebih mengarah pada kemampuan *agen* dalam membahasakan sesuatu atas tindakan yang dilakukannya. Sebaliknya kesadaran *praktis* adalah lebih pada pengetahuan praktis dari *agen* yang sulit untuk diurai. Sedangkan ketidakmampuan membahasakan sesuatu atas tindakan disebut ketidaksadaran (Giddens, 2010, hlm.64).

Dari sini peneliti melihat, bahwa motivasi *expert agen* dan *lay agen* yang mengarah pada motivasi akan penghargaan dan motivasi atas aktualisasi diri sebagai suatu bentuk kesadaran *diskursif*. Dimana pada motivasi ini mereka mampu mengungkapkan secara verbal atas tindakan yang dilakukannya dan mereka menyadari dengan jelas motif keinginan mereka dalam kontestasi pemilihan kepala desa.

Sedangkan dalam konteks motivasi atas kebutuhan sosial, peneliti melihat ini sebagai bentuk dari kesadaran *praktis agen*, kerana pada intinya di motivasi ini seorang *agen* tidak mampu menguraikan secara jelas motivasi atas tindakan yang dilakukan. Tetapi dalam tindakan *agen* terlihat secara nyata motivasi mereka dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Namun disisi lain peneliti melihat bentuk kesadaran *diskursif* dalam kontestasi pemilihan kepala desa, cenderung bertentangan, dimana ungkapan verbal mereka tidak sama dengan apa yang dilakukan secara praktis. Jadi peneliti melihat diantara kesadaran *diskursif* dan kesadaran *praktis agen* ini terdapat sebuah motivasi tidak sadar dari dalam diri *agen* di dalam kontestasi pemilihan kepala desa.

#### D. ANALISIS PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini, setidaknya peneliti akan melihat keterkaitan antara praktik politik uang dan kesadaran agen dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Dimana dalam praktik politik uang ada keterlibatan agen di dalam praktik politik uang, tindakan agen di dalam kontestasi pemilihan kepala desa juga didasari atas motivasi dan motif di dalam tindakannya.

Jika dilihat dalam teori strukturasi Giddens, peneliti melihat adanya struktur yang bermain di dalam praktik politik uang maupun kesadaran *agen* dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Disini setidaknya peneliti melihat, di dalam tindakannya mereka memainkan dan mereproduksi struktur dengan sedemikian rupa. Dalam penelitian ini peneliti melihat, bahwa permainan struktur dimulai sebelum pemilihan kepala desa. Pada saat itu, permainan struktur oleh agen dimulai dengan munculnya struktur wacana S-D-L (*Signifikasi, Dominasi, Legitimasi*).

Pada stuktur wacana ini *agen* mewacanakan tentang siapa calon yang akan diusung sebagai kandidat calon kepala desa. Kemudian setelah adanya kandidat calon kepala desa, muncul *dominasi* yang menyangkut kewenangan dalam pembentukan tim pemenangan. Kemudian pada tahap *legitimasi* ini lebih mengarah pada suatu pengesahan status agen dalam pemilihan kepala desa. Pengesahan status ini yang memberi batasan bahwa dalam pemilihan kepala desa ada kandidat calon kepala desa, tim sukses dan pemilih yang secara otomatis terlegitimasi oleh masyarakat itu sendiri.

Kemudian, ketika seorang sudah mempunyai legitimasi atas status masing-masing, struktur ini berubah dan tereproduksi sebagai struktur baru yang lebih menonjolkan sebuah peran. Dimana dalam pembedaan status ini juga akan memberdakan peran agen. Dalam hal ini striker wacana tereproduksi menjadi struktur dominasi atas orang atau politik D-S-L. Dimana *Dominasi* berperan sebagai upaya mendominasi penguasaan suara masyarakat dalam mendukung kandidat kepala desa melalui tindakan politik uang. Kemudian (*Signifikasi*) dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kampanye melalui pewacanaan yang dibangun oleh kubu kandidat calon kepala desa agar mampu menyakinkan masyarakat. Kemudian *Legitimasi* yang melahirkan sebuah keyakinan masyarakat dalam memilih kandidat calon kepala desa pada pemilihan kepala desa hingga terpilihnya seseorang kandidat sebagai kepala desa.

Di dalam struktur inilah kemudian praktik politik uang juga dimainkan sebagai upaya pemenangan kandidat calon kepala desa. Hasil penelitian ini telah dipaparkan bahwa praktik politik uang telah terjadi dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh *agen* pada kegiatan kampanye. Tindakan inilah yang kemudian disebut sebagai korupsi pemilu (Hobbes dalam ICW, 2010, hlm. 11). Di mana

praktik politik uang ini setidaknya telah dilakukan sebelum pemilihan kepala desa berlangsung dan dilakukan oleh kedua kubu kandidat calon kepala desa. Sedangkan menurut Hobbes dalam ICW (2010) bahwa korupsi pemilu dapat terjadi jika menyangkut 3 hal yaitu : 1. Keterlibatan lembaga publik dimana dalam praktik ini ada keterlibatan dari aparat pemerintah desa ataupun perangkat desa, 2. Berpengaruh pada kepentingan publik artinya praktik politik uang memberikan dampak bagi masyarakat 3. Terdapat kepentingan yang berpedoman pada sudut pandang pasar yaitu adanya hitungan ekonomi dari *agen* mengenai apa yang dikeluarkan dengan apa yang di dapatkan nantinya.

Kemudian setelah terpilihnya kandidat sebagai kepala desa, dan mempunyai dominasi. Hal yang terlihat dari penelitian ini adalah adanya hubungan interaksi antara kepala desa terpilih dengan pendukungnya. Yang kemudian ini terlihat adanya hubungan lain yaitu mengarah pada pembentukan struktur baru setelah pemilihan kepala desa. Struktur baru ini lebih mengarah pada dominasi atas ekonomi yaitu D-S-L. Dimana *dominasi* terlihat dari sebuah struktur yang terbentuk diantara hubungan *agen-agen* di dalam pemerintahan desa. Kemudian *signifikasi* mengacu pada wacana-wacana yang dibangun oleh *agen* untuk melancarkan segala usaha demi tercapainya segala tujuan ekonominya. Kemudian pada *dominasi* atas ekonomi akan diperoleh ketika semua usaha mencapai tujuan ekonomi tersebut mampu difasilitasi dan *dilegitimasi* oleh kebijakan-kebijakan dari pemerintah desa yang baru dan menguntungkan dirinya maupun pada tim sukses pendukungnya.

Menurut pandangan Phillip dalam ICW (2010) keterkaitan antara *agen* yang berkuasa dan dikuasai dalam artian kepala desa terpilih dan pendukungnya pasca pemilihan kepala desa akan berpeluang memunculkan korupsi politik. Dimana di dalam kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa akan dapat dipengaruhi oleh tim suksesnya terutama yang bermain dalam tataran pemerintah desa. Korupsi politik dapat dilakukan melalui tugas dan wewenang *agen* di dalam birokrasi pemerintahan desa (ICW, 2010, hlm. 13).

## **E. KESIMPULAN**

Proses awal yang telah dibangun peneliti, bahwa praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa dilakukan oleh calon kepala desa dan pemilih. Kemudian politik uang dilakukan oleh pelaku dengan membagikan uang dan barang. Kemudian pada aspek kesadaran pelaku proposisi awal peneliti yaitu karena pelaku mempunyai motif atas tindakan dan partisipasi dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Pada penelitian ini proposisi akhir penelitian ini lebih mengarah pada perbaikan proposisi awal dimana hasil penelitian yang diperoleh lebih luas daripada proposisi awal yang dibangun oleh peneliti.

Dari penelitian ini, peneliti mendapat hasil. *Pertama* pada praktik politik yang telah terjadi dilakukan oleh tiga agen yaitu calon kepala desa, tim sukses dan pemilih. Praktik politik uang dilakukan melalui kegiatan kampanye dengan membagikan uang tunai, barang, sumbangan maupun janji-janji politik pada pemilih.

Kedua, bahwa dalam melakukan tindakanya, para agen mempunyai motivasi yang mengarah pada keinginan-keinginan secara verbal, juga mengarah pada motivasi ekonomi sebagai alasan mendasar dalam berpartisipasi pada pemilihan kepala desa. Dari penelitian ini peneliti melihat, bahwa sebuah jabatan kepala desa layak untuk diperebutkan dan diperjuangkan oleh masing-masing pihak karena pada sebuah jabatan kepala desa mampu memberikan akses secara ekonomi maupun politik bagi orang-orang yang berperan di dalamnya. Melalui jabatan ini para agen di dalamnya memperoleh keuntungan yang mampu menutupi ketidakrasionalan atas modal yang telah dikeluarkannya.

Pada akhirnya peneliti melihat ini, dalam sebuah kesatuan bahwa di dalam kontestasi pemilihan kepala desa di Desa Jatirejo pelanggaran dalam bentuk korupsi pemilu tidak bisa dihindarkan dalam rangka memperebutkan sebuah kursi jabatan kepala desa. Kemudian pasca terpilihnya seseorang mejadi kepala desa, peluang korupsi politik lebih nampak terlihat dilakukan oleh para elite pemerintahan desa maupun para pelaku pendukung dalam kemenangan kepala desa. Maka dapat disimpulkan perilaku korupsi politik merupakan akibat dari korupsi pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Attas, Syed Hussein. (1975). *The sociology of corruption*. Diterjemahkan oleh Al Ghozie Usman. Jakarta: LP3ES.
- Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Giddens, Anthony. (1993). *Metode sosiologi: Kaidah-kaidah baru*. Diterjemahkan oleh Eka Nugraha dan Wahmuji (2010). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, Anthony. (2010). *Teori strukturasi*. Diterjemahkan oleh Maufur dan Daryatno. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamid, Edy Suandi. (2004). *Memperkokoh otonomi daerah*. Yogyakarta: UII Press.

- Hastuti dkk. (2012). *Politik uang dalam pemilihan kepala desa Cangkringan dan desa Dawuhan kecamatan Talang kabupaten Tegal*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- ICW, Team Perumus Inisiasi Masyarakat. (2010). *Korupsi pemilihan umum di Indonesia*. Jakarta: Indonesian Corruption Watch.
- Ismawan, Indra. (1999). *Money politik (pengaruh uang dalam pemilu)*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Maschab, Mashuri. (2013). *Politik pemerintahan desa di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov Universitas Gajahmada.
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Petton, M. Q (1991). *Metode evaluasi kualitatif*. Diterjemahkan oleh Budi Puspo Priyadi (2009). Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Priyono, H. (2002). *Anthony Giddens: Suatu pengantar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ritzer, G., & Douglas, B. (2004). *Sociological theory*. Diterjemahkan oleh Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Salim, A. (2006). *Teori dan paradigma penelitian sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Scott, J. (2011). *Sociology: The key concepts*. Diterjemahkan oleh tim penerjemah Labsos FISIP UNSOED. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siswoyo, S. (2008). *Sosiologi pedesaan dan perkotaan*. Malang: Agritek YPN.
- Sugiono. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, P.A (2013). *Mahalnya demokrasi mudarnya ideologi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Widjaja, H.A.W. (2003). *Otonomi desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wisadirana, D. (2005). *Metode penelitian dan pedoman penulisan skripsi untuk ilmu sosial*. Malang: UMM
- Yin, K. R. (2013). *Studi kasus: Desain dan metode*. Diterjemahkan oleh Djauzi Mudzakir. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **Majalah**

- Juliawan, H. (2010, Januari-Februari). Dunia yang berlari. *Majalah Basis*, 01-02.

**Situs Web**

Darmawan, D. (2012, November). *Pemilihan umum dan demokrasi. Jakarta Selatan*. Diakses pada tanggal 22 Januari 2014 dari [suarapublik.co.id/index/index.php?politik-uang](http://suarapublik.co.id/index/index.php?politik-uang).)

Saylor Foundation (2015). *Institutional review board researcher's guide*. (2012, 31 Mei). Diakses pada tanggal 14 Januari 2015 dari <http://www.saylor.org/site/wpcontent/uploads/2011/08/PSYCH202A-3.1.4-Institutional-Review-Board.pdf>

**Surat Kabar Online**

Politik dinasti merambah Kediri. (2013, 30 Oktober). *Surya Online*. Diakses dari <http://surabaya.tribunnews.com/2013/10/30/politik-dinasti-merambah-Kediri> pada 22 Januari 2014.

### **Riwayat Hidup Penulis**

**Mohamad Amanu**, lahir di Kediri 23 Desember 1991 adalah Mahasiswa sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang lulusan tahun 2015. Selama menjadi Mahasiswa sosiologi banyak penelitian yang telah dilakukan mulai dari penelitian pada setiap mata kuliah praktikum dan aktif melakukan penelitian di lembaga survey sebagai enumerator. Penelitian yang terbaru ialah mengenai Politik uang dalam pemilihan kepala desa (studi kasus di desa Jatirejo kecamatan Banyakan kabupaten Kediri) untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi persyaratan memperoleh gelar strata 1 Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.

*Contact Person: 085735154842*

*Email: amanumuhammed@gmail.com*